

Pelatihan Pemerataan Kebersertaan Jaminan Kesehatan Nasional Secara Online Di Wonolelo Pleret Bantul

Sri Sularsih Endartiwi¹

¹STIKES Surya Global Yogyakarta

Email penulis korespondensi (^K): tiwinafla2@gmail.com

Abstract

Citizens of the Cegokan Wonolelo Pleret Bantul sub-village still do not understand the National Health Insurance (NHI) program managed by the BPJS. Public knowledge is still very minimal and the desire to register to become NHI participants is still low due to several factors such as the economy and information that is still minimal. The objective is the public can register to become a National Health Insurance participant online. Method by Counseling and training. Knowledge and ability of community participants about the ways and flow of registration to become participants in the National Health Insurance program increased after counseling and training from 40% to 95%. Community can practice registering for NHI online. Community knowledge and abilities are good about registering as participants in the National Health Insurance program after counseling and training.

Keyword: NHI participants

Pendahuluan

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahap awal JKN mengintegrasikan jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta jamkesmas, askes, jamsostek, dan anggota TNI/Polri yang selama ini dikelola secara terfragmentasi ke dalam suatu wadah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.⁽¹⁾ Proses pentahapan ini direncanakan akan dilaksanakan sampai tahun 2019 di mana seluruh warga negara akan tercakup dalam sistem jaminan sosial ini.

BPJS merencanakan bahwa pada tahun 2014 masyarakat Indonesia yang ikut dalam program SJSN mencapai 70%. Dan target yang lebih tinggi lagi yang dicanangkan oleh BPJS adalah pada tahun 2017 akan terdapat 90% lebih rakyat Indonesia sudah mengikuti program SJSN.² Dan pada tahun 2019 ditargetkan seluruh warga di Indonesia masuk SJSN. Berikut ini memberikan akan data capaian kebersertaan JKN perKabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 4 Agustus 2019.

Tabel 1. Data capaian Peserta per Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per Agustus 2019.

No	Nama Dati 2	PBI APBN	PBI APBD	PPU	BP	PBPU	Tota Peserta	Jumlah Penduduk DKB 2 Tahun 2018	%
1	Bantul	481.715	62.367	210.431	35.955	93.218	883.686	939.718	94.04
2	Gunung Kidul	436.675	157.447	79.387	17.837	35.860	727.206	765.284	95.02
3	Kota Yogyakarta	100.697	87.136	121.475	31.607	68.396	409.311	413.961	98.88
Total KC Yogyakarta		1.019.087	306.950	411.293	85.399	197.474	2.020.203	2.118.963	95.34
4	Kulon Progo	237.429	58.354	84.275	18.073	22.256	420.387	448.114	93.81
5	Sleman	298.152	142.603	322.769	59.912	178.112	1.001.548	1.063.938	94.14
Total KC Sleman		535.581	200.957	407.044	77.985	200.368	1.421.935	1.512.052	94.04
Total DIY		1.554.668	507.907	818.337	163.384	397.842	3.442.138	3.631.015	94.80

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019

Berdasarkan data tersebut dapat dikeathui bahwa jumlah cakupan kepesertaan untuk KC Yogyakarta yang terendah adalah Kabupaten Bantul yaitu sebesar 94.04%. Di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul masih terdapat sekitar 10% warganya yang belum terdaftar dan belum paham cara mendaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Metode Pengabdian

Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan tentang pemerataan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wonolelo, Pleret, Bantul yang meliputi: penyuluhan kesehatan, pemutaran video tentang cara pendaftaran JKN secara online, praktek mendaftar JKN secara online, diskusi dan tanya jawab tentang JKN dan BPJS Kesehatan.

Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah warga masyarakat Dusun Cegokan Desa Wonolelo Pleret Bantul. Metode penyuluhan dengan ceramah dengan alat bantu yaitu LCD proyektor kemudian dilanjutkan dengan praktek mendaftar menjadi peserta JKN secara online. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ceramah dan praktek pendaftaran JKN secara online dilaksanakan selama 60 menit dan tanya jawab selama 30 menit serta peserta diskusi yang berhasil menjawab diberikan *reward*

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 yang dihadiri oleh 32 warga Dusun Cegokan Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta. Kegiatan ini mendapatkan dukungan dan tanggapan yang baik dari pihak Kepala Dusun maupun warga masyarakatnya karena kegiatan tersebut belum pernah dilakukan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa masyarakat warga Desa Wonolelo belum mengetahui secara detail tentang program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS

Kesehatan. Masyarakat sudah mengetahui akan adanya BPJS Kesehatan, akan tetapi mereka belum mengetahui tentang program Jaminan Kesehatan Nasional. Warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 95% belum mendaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alasan mereka belum mendaftar menjadi peserta JKN karena beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi. Kondisi masyarakat yang mayoritas sebagai petani, pedagang yang pendapatannya setiap bulan tidak menentu membuat mereka enggan untuk mendaftar menjadi peserta JKN.

Kedua, faktor kesehatan. Masyarakat menganggap mereka pada saat ini dalam kondisi yang sehat, sehingga masih belum perlu untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Ketiga, minimnya informasi. Warga masih sangat rendah pengetahuannya tentang program JKN dan manfaat apa saja yang diperoleh dengan mengikuti program ini. Hal tersebut membuat masyarakat belum mengetahui bagaimana alur untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Keempat, anggapan negatif tentang BPJS Kesehatan. Informasi yang masyarakat terima dari media sosial atau berita yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah tidak bagus, pelayanan yang membedakan, adanya keluhan dari masyarakat banyak terkait pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini mempengaruhi keinginan warga untuk mendaftar menjadi peserta JKN.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. JKN mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan.⁽³⁾

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin meliputi:

1. Tidak sesuai prosedur
2. Pelayanan di luar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
3. Pelayanan bertujuan kosmetik
4. *General check up*, pengobatan alternatif
5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi
6. Pelayanan kesehatan pada saat bencana
7. Pasien bunuh diri /penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba

Program JKN diharapkan dapat menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan persentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran.⁽⁴⁾

Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai beberapa pilihan iuran yang dapat dipilih oleh warga masyarakat yang bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Sebesar Rp. 25.500,- per orang

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Sebesar Rp. 51.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. Sebesar Rp. 80.000,- per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.⁽⁵⁾

Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. Besaran denda yang paling tinggi adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN.

Pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau yang biasa disebut dengan peserta mandiri pada saat ini bisa dilakukan secara online, bisa menggunakan Smartphone atau komputer. Selain itu pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan dengan membawa beberapa persyaratan dengan alur pendaftarannya sebagai berikut:

1. Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan
2. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga
3. Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - b. Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar
 - c. Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta yang ada didalam Kartu Keluarga
 - d. Pasfoto 3 x 4, masing-masing sebanyak 1 lembar.
4. Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA)
5. Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)
6. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetak kartu JKN.

Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan maka warga diberikan panduan untuk mendaftar secara online. Hasilnya masyarakat menjadi antusias untuk mendaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara online karena tidak perlu ribet datang ke kantor BPJS Kesehatan yang jaraknya cukup jauh. Selain itu masyarakat tidak membuat waktu terlalu lama karena tidak perlu pergi ke kantor BPJS Kesehatan atau mengantre yang cukup lama.

Simpulan dan Saran

Kegiatan pelatihan ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut ; warga masyarakat Desa Wonolelo pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan mengalami peningkatan setelah dilakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang mendaftar online JKN dan warga dapat melakukan pendaftaran program JKN secara Online.

Saran yang bisa disampaikan terkait kegiatan pelatihan ini adalah pihak desa bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Warga masyarakat dapat terus mencari informasi terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional dan cara mendaftar menjadi peserta.

Daftar Pustaka

1. Kemenkes RI. 2013. *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta
2. Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta.
3. Kemenkes RI. 2013. *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan*. Jakarta
4. WHO. (2005). *Social Health Insurance: Selected Case Studies from Asia and the Pacific*. India: SEARO Regional Publication
5. Kemenkes RI. 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta.